

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah aplikasi dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi. Aplikasi SAKTI digunakan untuk menggantikan Aplikasi Eksisting yang saat ini digunakan oleh Satker yaitu Aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan per 31 Desember 2024 - *Audited*. Entitas berkedudukan di Jalan Laks. R.E. Martadinata Tanjungpandan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Perikanan Terpadu.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 - *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN. Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegritaskan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SAKTER dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan

- sub modul Manajemen Komitmen). Modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses Pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Portal SPAN

A.3. Portal SPAN

Portal SPAN merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama Satker tidak perlu secara langsung datang ke KPPN untuk menyamaikan ADK, namun cukup masuk ke Portal SPAN dan mengakses menu yang ada untuk melakukan pengiriman ADK ke SPAN. Sebaliknya, penerimaan data dari SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN. Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi atas ADK yang dikirimkan oleh Satker. Validasi merupakan tanda bukti bahwa ADK berasal dari satker yang benar dan telah diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang.

SMS SPAN

A.4. SMS SPAN

SMS SPAN merupakan sarana yang disediakan untuk satker dalam memonitor status pengiriman ADK. Data ADK dan SPAN dan mengetahui status data keuangan lainnya. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format yang ditentukan SPAN – SMS *service*. Sistem SPAN akan mengirimkan informasi yang diperlukan secara otomatis. Pengecekan keabsahan SMS tersebut akan dilakukan oleh sistem melalui *Personal Identification Number* (PIN) yang identik, khusus dan hanya diketahui oleh pejabat satker yang berwenang. Dengan demikian pejabat tersebut bertanggungjawab penuh atas penggunaan PIN dalam komunikasi data SMS SPAN yang otomatis menjamin keabsahan suatu SMS yang dikirimkan ke portal SPAN.

Keamanan data sakti

A.5. Keamanan Data Sakti

Keamanan data sebagai hasil dari SAKTI menjadi salah satu perhatian yang sangat krusial dan sudah dipikirkan dalam penerapan SPAN semua data yang di pertukarkan dalam interkoneksi SAKTI dan SPAN harus memenuhi syarat keamanan yang ketat sebagai berikut :

1. Pembatasan akses ke portal SPAN

Hanya pihak-pihak yang terdaftar sebagai user saja yang bisa mengakses/menggunakan portal SPAN.

2. Kerahasiaan Data

ADK SAKTI akan menggunakan pengamanan berupa *hash code* untuk masing-masing data sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan tidak akan berubah selama proses perpindahan data.

3. Keaslian data

Setiap ADK akan dijamin keasliannya menggunakan PIN. Penggunaan PIN memastikan bahwa ADK telah diketahui, disetujui dan diotorisasi oleh pejabat satker yang berwenang.

Berbagai Modul yang ada di SAKTI :

1. Modul Penganggaran
2. Modul Komitmen
3. Modul Pembayaran
4. Modul Bendahara
5. Modul Persediaan
6. Modul Aset Tetap
7. Modul Pelaporan
8. Modul Administrastrator.

Pendapatan- LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).

- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 3) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- 4) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- 1) Tanah;
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Realisasi
Pendapatan Rp
1.951.391.331*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.951.391.331 atau mencapai 106% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.835.595.000 Kenaikan penerimaan dikarenakan PNPB yang dipungut sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.85 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Semester II T.A. 2024 terdiri dari:

MAP 425131 yaitu Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan didapat dari Sewa rumah dinas yang dipotong dari gaji pegawai melalui SPM Gaji Sebesar Rp13.380.048.

MAP 425151 yaitu Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yaitu Jasa Kendaraan, Jasa Tangki BBM dan Instalasinya, Jasa Alat (Jasa Forklif, Jasa Dumptruk, Jasa Kendaraan Tangki Air, Jasa Dok, Jasa Bengkel, Tanah (Biaya Pengembangan, Pemeliharaan Prasarana, Bangunan Pelabuhan Perikanan) serta Tanah yang dipakai untuk (Jasa Lapangan Penjemuran Jaring dan Tempat Penumpukan Barang) serta Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana. Sebesar Rp593.374.419.

MAP 425621 yaitu Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan Terdiri dari Jasa Tambat Labuh, Jasa Pas Masuk, Jasa Pengadaan Es, Jasa Pengadaan air (Air eceran, Air Mobil Tangki, Air Langganan) dan Jasa Kebersihan Pelabuhan (Jasa

Kebersihan Kawasan dan Jasa Kebersihan Kolam Pelabuhan) sebesar Rp1.344.636.583.

MAP 425911 yaitu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp281.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. Per 31 Desember
2024 & 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	
-Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.380.048	13.201.848	1,35
-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	593.374.419	450.898.975	31,60
-Pendapatan Jasa Pelab.Perikanan	1.344.636.583	1.396.037.414	-3,68
Pendapatan Jasa Lainnya		-	
Pendapatan Anggaran Lain-Lain		39.773.747	0,00
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TA	281	68	313,24
JUMLAH	1.951.391.331	1.899.912.052	2,71

*Realisasi Belanja
Negara
Rp 12.638.912.515*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp12.638.912.515 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp13.092.461.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	5.821.657.000	5.820.465.516	99,97
Belanja Barang	5.574.475.000	5.129.216.674	92,01
Belanja Modal	1.696.329.000	1.689.230.325	99,58
Total Belanja Kotor	13.092.461.000	12.638.912.515	96,53
Pengembalian Belanja	-	-	-
JUMLAH	13.092.461.000	12.638.912.515	96,53

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.820.465.516	4.150.697.953	40,23
Belanja Barang	5.129.216.674	5.664.815.562	(9,45)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	1.689.230.325	1.376.618.583	22,71
Jumlah	12.638.912.515	11.192.132.098	12,93

Belanja Pegawai
Rp5.820.465.516

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.820.465.516 atau sebesar 99,97% dan Rp4.150.697.953 atau sebesar 96,13%. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami

kenaikan sebesar 40,23% persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan PPPK baru tahun 2024 dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
2. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai .

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.822.285.970	1.640.996.388	11,05
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.161.762.726	493.201.937	135,56
Belanja Lembur	65.206.000	91.502.000	(28,74)
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PNS	1.659.201.363	1.452.813.602	14,21
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PPPK	1.112.009.457	472.184.026	135,50
Jumlah Belanja Kotor	5.820.465.516	4.150.697.953	40,23
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS		136	
Pengembalian Belanja pembulatan Gaji PNS	369	604	-
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS		-	-
pengambalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	720.000	1.100.000	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		730.000	-
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	104	-	-
Jumlah Belanja	5.819.745.043	4.148.867.213	40,27

*Belanja Barang dan
Jasa
Rp5.129.216.674*

B.4. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.129.216.674 dan Rp5.664.815.562. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp535.598.888 atau sebesar 9,45%% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

- Adanya Automatic Adjustment yaitu Pemblokiran Sebagian Anggaran.

Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1.395.937.992	1.414.804.059	(1,33)
Belanja pengiriman surat dinas pusat	2.728.600	782.000	248,93
Belanja Honor operasional Satker	107.808.000	182.072.000	(40,79)
Belanja Barang Operasional Lainnya	128.176.963	110.254.914	16,26
Belanja Bahan	214.116.385	253.739.062	(15,62)
Belanja Honor output kegiatan	39.750.000	45.300.000	(12,25)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	32.541.237	66.134.015	(50,80)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40.709.094	66.992.958	(39,23)
Belanja langganan Listrik	326.036.144	346.335.206	(5,86)
Belanja langganan Telpon	32.221.711	32.474.467	(0,78)
Belanja langganan Daya dan Jasa lainnya	3.755.480	-	-
Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000	-	-
Belanja sewa	1.260.000	1.450.000	(13,10)
Belanja Jasa profesi	8.500.000	5.400.000	57,41
Belanja jasa lainnya	39.880.631	257.470.250	(84,51)
Belanja Pemeliharaan	1.741.552.472	1.722.702.405	-
Belanja Perjalanan Dinas	954.241.965	1.158.904.226	-
Jumlah Belanja	5.129.216.674	5.664.815.562	(9,45)

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 bernilai sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 yaitu 0%. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal Tanah
Rp0,-*

B.6. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dikarenakan tidak adanya anggaran yang diperuntukkan belanja modal tanah tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1.118.181.325*

B.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp1.118.181.325 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp750.000.000. Hal ini disebabkan oleh adanya transfer masuk aset jenis alat besar berupa Truk Crane .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	1.118.181.325	750.000.000	49,09
Jumlah Belanja Kotor	1.118.181.325	750.000.000	49,09
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	1.118.181.325	750.000.000	49,09

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp571.049.000*

B.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp571.049.000 dan Rp626.618.583. Pada tahun 2024 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sudah terealisasi sebesar 98,89% dari jumlah anggaran sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 99,63%.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan			
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	571.049.000	626.618.583	-8,87
Jumlah Belanja Kotor	571.049.000	626.618.583	-8,87
Pengembalian Belanja Modal	-	0	
Jumlah Belanja	571.049.000	626.618.583	-8,87

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp1.689.230.325*

B.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember TA 2024 dan 2023 sebesar Rp1.689.230.325,- dan Rp1.376.618.583 mengalami kenaikan sebesar Rp.312.611.742 atau 22,71% dikarenakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sudah terealisasi pada Semester I 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	1.689.230.325	1.376.618.583	22,71
Jumlah Belanja Kotor	1.689.230.325	1.376.618.583	22,71
Pengembalian Belanja Modal	-7.098.675	-2.321.417	205,79
Jumlah Belanja	1.696.329.000	1.378.940.000	23,02

*Belanja Modal
Lainnya Rp0.-*

B.10. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0,- karena tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya di TA 2024 dan TA 2023.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0.-*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan TA.2023 adalah Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran		
-Uang Tunai di Brankas	-	-
-Uang di Rekening Bank	-	-
-Kwitansi UP	-	-
-Selisih Kas	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0.-*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan TA.2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak diperbolehkan ada karena Peraturan Bendahara harus menyetorkan langsung pendapatan pada hari itu juga.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2023	TH 2022
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0.-*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp 1.040.135*

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.040.135 dan Rp50.490 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.040.135	50.490
	-	-
Jumlah	1.040.135	50.490

C.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0.- dan Rp2.585.790. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

Piutang Bukan
Pajak
Rp0.-

diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang Lainnya	-	2.585.790
	-	2.585.790
Jumlah	-	2.585.790

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

**C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA
Rp0

C.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1			
2			
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0*

C.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.9. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2024	TH 2022
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp 4.710.000,-*

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.710.000 dan Rp3.467.268 mengalami kenaikan sebesar Rp1.242.732 atau sebesar 35,84%.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2024	TH 2023
Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.710.000	3.467.268
Bahan untuk pemeliharaan	-	-
Jumlah	4.710.000	3.467.268

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi berupa pembelian Pencetakan Blangko dan karcis Pas Masuk berada dalam kondisi baik sesuai Berita Acara Stock Opname nomor : B.2053/PPNTP/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11.Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Tahun 2024	Tahun 2023
1			
2			
3			
	Jumlah	-	-

TPA Rp 0

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(12.929). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah Rp
112.842.552.000

C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Per 31 Desember dan 2024 adalah sebesar Rp112.842.552.000. dan Rp112.842.552.000. Tidak mengalami kenaikan dan penurunan harga pada tahun 2024. Pada Tahun 2024 dengan rincian Revaluasi Aset Tetap pada Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II sebesar Rp(23.199.000), Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp(131.035.000) dan

Tanah untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp(437.128.000). Tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan berupa tanah yang diperuntukkan Rumah Dinas Kepala Pelabuhan, tanah untuk Rumah Mess Karyawan, tanah untuk Bangunan Kantor, tanah untuk Tempat Kerja Lainnya dan tanah untuk Bangunan air bersih. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	112.842.552.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	112.842.552.000

Rincian saldo Tanah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	856 M2	Jl. Laks. R.E.Martadinata	1,113,281,000
2	1.120 M2	Jl. Laks. R.E.Martadinata	1,635,000,000
3	49.858 M2	Jl. Laks. R.E. Martadinata	104,331,604,000
4	2.500M2	Jl. Gunung Sadai	838,190,000
5	3.208M2	Jl. Gunung Sadai	533,539,000
6	3.600M2	Jl.Laks. R.E. Martadinata	4,390,938,000
Jumlah			112,842,552,000

Peralatan dan Mesin
Rp 13.340.053.228

C.15. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp13.340.053.228 dan Rp10.495.291.676. Mengalami kenaikan sebesar Rp 2.844.761.552 atau sebesar 27,11%. Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan mesin dan TIK menggunakan e-katalog dengan sumber dana dari PNPB :

- a. LCD Projector Acer X1 XGA 4000AL sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar Rp7.850.000.
 - b. Printer EPSON L15150 sebanyak 4 unit dengan harga satuan sebesar Rp16.500.000.
 - c. CCTV PTZ 25 X Zoom sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp66.500.000.
 - d. Scanner EPSON DS-1630 sebanyak 2 unit dengan harga Rp9.400.000.
 - e. Laptop Case NB AXIO Pongo 725 sebanyak 7 unit dengan harga satuan sebesar Rp14.400.000.
 - f. Drone DJI Mini 4 Pro sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp27.300.000.
 - g. Laptop Case Axioo Mybook Pro 103 sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp11.750.000.
 - h. Printer EPSON L15150 sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar Rp17.000.000.
 - i. Scanner EPSON DS-1630 sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp9.400.000.
 - j. Laptop Case Axioo Mybook Pro sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar Rp12.400.000.
 - k. Lampu Solar Cell PJUTS sebanyak 10 unit dengan harga satuan sebesar Rp18.800.000.
2. Pengadaan non peralatan mesin dan TIK menggunakan e-katalog :
- a. Alat Pemadam Kebakaran Float Pump HONDA GXV 160 OHV sebanyak 3 unit dengan harga satuan sebesar Rp36.600.000.
 - b. Laci Box Charging Handphone sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.220.000.
 - c. Lemari Display APD sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp6.350.000.

- d. Lemari Display Buckingham sebanyak 1 unit dengan harga satuan 4.030.000.
 - e. Meja Kerja Kayu (Uk.120 x 60 x 75) sebanyak 15 unit dengan harga satuan sebesar Rp4.150.000.
 - f. Kursi Rapat Besi/Metal sebanyak 15 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.600.000.
 - g. Meja Rapat (Uk 620 x 150 x 75) sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp22.800.000.
 - h. Kursi Kantor Besi/Metal Novus TS03503A sebanyak 15 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.550.000.
 - i. Alat Penarik Kapal Bolder / Bollard Miring 10 Derajat 50 ton sebanyak 15 unit dengan harga satuan sebesar Rp10.456.755.
3. Pengadaan alat angkut kendaraan bermotor roda 2 dengan sumber dana dari PNBPN :
- Sepeda Motor Honda New Beat Dx Smart Key (PP.Selat Lampa) sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar Rp20.600.000.
 - Sepeda Motor Honda New Beat Dx Smart Key (PP.Baran) sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar Rp19.600.000.
 - Sepeda Motor Honda New Beat Dx Smart Key (PP.Kijang) sebanyak 1 unit dengan harga satuan sebesar Rp19.600.000.
4. Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin sebanyak 1 unit Truck Crane dengan nilai sebesar Rp1.603.432.600
5. Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin sebanyak 1 unit Station Wagon dengan nilai sebesar Rp309.772.875

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.495.291.676
Mutasi bertambah	2.844.761.552
Hibah Barang	0
Transfer Masuk :	1.603.432.600
	309.772.875
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	13.340.053.228
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	13.340.053.228

*Gedung dan
Bangunan
Rp 25.122.165.772*

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 25.122.165.772 dan Rp 24.462.609.772. Terdapat mutasi penambahan pada semester II tahun 2024 sebesar Rp 659.556.000 atau sebesar 2,70%. Realisasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan TA. 2024 berupa :

1. Rehab Gapura Pintu Masuk sebesar Rp194.475.000,- sesuai dengan Nomor Kontrak 017/PPK-SPK-Gapura/PL.420/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
2. Renovasi Eksterior Gedung Kantor sebesar Rp193.695.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 033/PPK-SPK-Renov/PL.420/III/2024 tanggal 1 Maret 2024.
3. Pembuatan Kanopi TPI, Pagar dan Peningkatan Lantai sebesar Rp182.879.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 042/PPK-SPK-TPI/PL.420/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
4. Pemeliharaan Lantai Tempat Perbaikan Jaring sebesar Rp187.555.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 117/PPK-SPK-Perb.Jaring/PL.420/VII/2024 tanggal
5. Pemeliharaan Bangunan Lantai Jemur Permanen sebesar Rp179.066.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 081/PPK-SPK-LANTAI JEMUR/PL.420/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

6. Pemeliharaan Gedung Balai Pertemuan sebesar Rp93.002.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 025/PPK-SPK-GD.Balai/PL.420/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.
7. Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor Pelayanan sebesar Rp135.015.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 108/PPK-Gdg.Ktr/PL.420/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
8. Pemeliharaan Saluran Drainase sebesar Rp163.678.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 167/PPK-SPK-Draenase/PL.420/X/2024 tanggal
9. Pemeliharaan Pos Pas Masuk sebesar Rp73.087.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 179/PPK-SPK-Pos/PL.420/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
10. Pemeliharaan Dermaga sebesar Rp60.638.000 sesuai dengan Nomor Kontrak 191/PPK-SPK-Dermaga/PL.420/XI/2024 tanggal.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24.462.609.772
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	659.556.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	25.122.165.772
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	25.122.165.772

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp22.609.199.648*

C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jembatan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.609.199.648 dan Rp22.609.199.648 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	22.609.199.648
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	22.609.199.648
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	22.609.199.648

*Aset Tetap Lainnya
Rp31.100.000*

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp31.100.000 dan Rp31.100.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk tahun 2024.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp137.700.050*

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 137.700.050 dan Rp 0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan TPI Permanen yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(28.817.897.777)*

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(28.817.897.777) dan Rp(24.318.598.529) mengalami kenaikan sebesar Rp(4.499.299.248) atau sebesar 18,50%. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	112.842.552.000		112.842.552.000
Peralatan dan Mesin	13.340.053.228	11.111.255.045	2.228.798.183
Gedung dan Bangunan	25.122.165.772	7.579.889.126	17.542.276.646
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.609.199.648	10.126.753.606	12.482.446.042
Aset Tetap Lainnya	31.100.000	0	31.100.000
Akumulasi Penyusutan	-28.817.897.777	28.817.897.777	0
Jumlah Aset Tetap	145.127.172.871	28.817.897.777	145.127.172.871

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.21. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp15.365.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

*Aset Lain-lain
Rp368.358.502*

C.22. Aset Lain-Lain (Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan)

Aset Lain-lain yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp368.358.502 dan Rp366.593.518. Aset lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas berupa Mesin Skrup, Printer, Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 kva, Lampu Suar, Bangunan Bengkel atau Hanggar Permanen, PC Unit, Station Wagon, Bangunan Kolam atau Bak Ikan, Focusing Screen atau LCD Projector, Jaringan Pembawa kapasitas kecil, Jalan Provinsi Lokal, Bangunan Gedung Permanen, Bangunan Irigasi Teknis, Perkakas Kantor Lainnya, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Stationery Compresor, Kardex Besi, AC Spluit, Pesawat Telepon, Mesin Penghisap Debu, Saluran Sekunder, Saluran Tersier Pembuang, Stationary Generating Set, Pompa Tangan. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	366.593.518
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset lainnya	15.365.000
Mutasi kurang:	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
per 31 Desember 2024	368.358.502
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	368.358.502

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(242.792.686)*

C.23. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(242.792.686) dan Rp(251.262.143) mengalami penurunan sebesar Rp8.469.457 atau sebesar (3,37%). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan kontra

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
	Aset Tak Berwujud			
1	Software	15.365.000	(15.365.000)	0
	Aset Lain-lain	368.358.502	1.764.984	366.593.518
	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(242.792.686)	8.469.457	(234.323.229)
	Jumlah	125.565.816	(5.130.229)	132.270.289

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

C.24. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp26.121.522

C.25. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.121.522,- dan Rp32.541.847. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari

12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Langganan Listrik	25.015.185
2	Beban Langganan Telepon	1.106.337
Total		26.121.522

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp21.635.522*

C.26.Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp21.635.522 dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima Dimuka tersebut bersumber dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA.2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	CV. Laut Jaya	4.250.794
2	PT. Tunas Surya sepakat	1.050.623
3	Aprilina	691.496
4	Nurasia	6.598
5	Jonny	329.567
6	ENI	301.586
7	Mayang Sari	187.254
8	Sopian	187.254
9	Sian Jun	261.659
10	Fredy Widjaja	3.413.361
11	Yolanda	5.718.821
12	Sadeli	4.764.617
13	PT.Surya Smber Sentosa Inti	471.891
JUMLAH		21.635.522

*Beban Yang Masih
Harus Dibayar
Rp.26.121.522*

C.27. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.121.522 dan Rp32.541.847 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar TA.2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	25.015.185	32.541.847
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	1.106.337	-
JUMLAH		26.121.522	32.541.847

*Ekuitas
Rp145.595.173.320*

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp145.595.173.320 dan Rp146.623.045.750. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp1.930.745.173

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.930.745.173 dan Rp1.900.404.487 mengalami kenaikan sebesar Rp30.340.686 atau sebesar 1,60%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
-Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.040.135	50.490	1.960
-Pend.sewa tanah,gedung dan bangunan	13.380.048	13.201.848	1
-Pend.Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	571.738.897	450.898.975	26,80
-Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.345.626.228	1.396.479.359	(3,64)
-Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	39.773.747	
-Penerimaan kembali Bel.pegawai TAYL	281	68	313,24
Jumlah	1.931.785.589	1.900.404.487	1,65

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan dari Jasa Kebersihan Kolam Pelabuhan yang terdiri dari :

NO	NAMA KAPAL	GT	NILAI PYMHD
1	KM. DEKA JAYA 3	22	112.035
2	KM. SEMESTA JAYA 5	14	63.000
3	KM.RIZKI YENI	15	432.000
4	KM. MAJU TJ	20	433.100
JUMLAH			1.040.135

Pendapatan Sewa gedung dan bangunan MAP 425131 merupakan pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Pegawai yang dipotong langsung melalui SPM Gaji Pegawai.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi MAP 425151 merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa Kendaraan, Jasa Tangki BBM, Jasa Dok, Jasa Bengkel, Jasa Tanah (Biaya Pengembangan, Pemeliharaan Prasarana dan Bangunan Pelabuhan Perikanan) serta Tanah yang dipakai untuk (Jasa Lapangan Penjemuran Jaring dan Tempat Penumpukan Barang).

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana MAP 425621 yaitu Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari Jasa Tambat Labuh, Jasa Pas Masuk, Jasa Pengadaan Es dan Jasa Kebersihan Pelabuhan.

Pendapatan Jasa lainnya MAP.425699 yaitu Jasa Pemakaian Listrik dan Anggaran Lain-lain MAP 425999.

*Beban Pegawai
Rp5.823.051.306*

D.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.823.051.306 dan Rp4.146.281.423. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.676.769.883 atau sebesar 40,44%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, PPPK, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.483.164.797	4.056.610.163	-14,14
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	2.274.680.509		0,00
Beban Lembur PNS	35.210.000	91.502.000	-61,52
Beban Lembur PPPK	29.996.000		0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	369	-1.830.740	-100,02
Pengembalian Belanja Tunj.Fungsional PNS	720.000		0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	104	-	0,00
Jumlah	5.823.771.779	4.146.281.423	40,46

*Beban Persediaan
Rp42.184.730*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.184.730 dan Rp67.217.690. Mengalami penurunan sebesar Rp(25.032.960) atau sebesar (37,24%). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-

barang yang habis pakai, pencetakan blangko dan persediaan Pita cukai, meterai dan leges termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	42.184.730	67.217.690	(37,24)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan pita cukai, materai dan			
Beban barang			
Beban Persediaan Bahan Baku			
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	42.184.730	67.217.690	(37,24)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2.386.292.818*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.386.292.818 dan Rp2.745.933.209. Mengalami penurunan sebesar Rp(359.640.391) atau sebesar (13,09%). Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023
Beban Keperluan Perkantoran	1.395.937.992	1.414.329.659
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.728.600	713.000
Beban honor Operasional Satuan Kerja	107.808.000	182.072.000
Beban Barang Operasional lainnya	128.176.963	110.254.914
Beban Bahan	214.116.385	253.739.062
Beban honor Output Kegiatan	39.750.000	45.300.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	32.541.237	66.134.015
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-
Beban Langganan Listrik	321.308.299	355.245.842
Beban Langganan Telepon	30.529.231	32.474.467
Beban Langganan Daya dan jasa lainnya	3.755.480	-
Beban Jasa Konsultan	60.000.000	-
Beban Jasa Sewa	1.260.000	1.450.000
Beban Jasa Profesi	8.500.000	5.400.000
Beban Jasa Lainnya	39.880.631	257.470.250
BebanJasa-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-
Jumlah	2.386.292.818	2.724.583.209

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.790.072.922*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.790.072.922 dan Rp1.817.620.449 mengalami penurunan sebesar (Rp359.640.391) atau (13,09%). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.094.823.567	918.507.749	16,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418.120.517	411.934.303	1,48
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18.470.000	214.421.452	-1061
Beban Pemeliharaan Irigasi	163.678.000	145.192.000	11,29
Beban Pemeliharaan Jaringan	46.460.388	32.646.901	29,73
Beban Ekstrakomtabel gedung dan bangunan	48.520.450	94.688.044	-95,15
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	230.000	0,00
Jumlah	1.790.072.922	1.817.620.449	-1,54

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp954.241.965*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp954.241.965 dan Rp1.158.904.226. Mengalami penurunan sebesar Rp(204.662.261) atau sebesar (17,66%). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.947.156	761.082.029	-23,67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.725.000	42.120.000	-5,69
Beban Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota	17.700.000	81.320.000	-78,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	315.869.809	274.382.197	15,12
Jumlah	954.241.965	1.158.904.226	-17,66

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2023. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2021	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2021	% NAIK (TURUN)
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.495.641.680

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.495.641.680 dan Rp2.306.853.192 mengalami kenaikan sebesar Rp188.788.488 atau (8,18%). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	521.245.274	380.919.738	36,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.134.045.635	1.091.684.929	3,88
Beban Penyusutan Jalan, dan jembatan	644.676.343	644.676.343	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	123.931.752	123.931.752	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	54.407.623	54.407.623	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	12.204.494	6.102.247	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.130.559	5.130.560	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.495.641.680	2.306.853.192	8,18

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.929. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	12.929	-100,00
		-	0,00
Jumlah	0	12.929	-100,00

Beban Lain-lain Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2022	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp(419.719)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 adalah Rp(419.719) dan Rp68 sehingga Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(419.719) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Suprlus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	419.719	68	617.134
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	419.719	68	617.134

Pos Luar Biasa
Rp(0)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2022	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp146.623.045.750

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp146.623.045.750 dan Rp147.619.542.825 mengalami penurunan sebesar Rp(996.497.075) atau sebesar (0,68%).

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

Rp(11.561.159.967)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(11.561.159.967) dan Rp (10.344.691.316) mengalami kenaikan sebesar Rp(1.216.468.651) atau sebesar 11,76. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

Penyesuaian Nilai Aset pada tanggal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0 ,- Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset.

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp3.138.368*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.138.368,- dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	3.138.368
Jumlah	3.138.368

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian uang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,- .

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp(265.859.944)*

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing adalah sebesar Rp(265.859.944) dan Rp55.974.195. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian ulang aset.

*Koreksi lain-lan
Rp12.929*

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi lainnya, Ekuitas Transaksi Lainnya, Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu, SAL Selisih Kurs Belum terealisasi dan Penyesuaian SAL BLU atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.929 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	12.929
Jumlah	12.929

*Transaksi Antar
Entitas
Rp10.795.996.184*

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.795.996.184 dan Rp9.292.220.046 mengalami kenaikan sebesar Rp1.503.776.138 atau 16,18%. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA.2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	- 1.951.391.331
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.638.912.515
Transfer Masuk	- 1.913.205.475
Transfer Keluar	1.913.205.475
Pengesahan Hibah Langsung	108.475.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	10.795.996.184

*Penurunan Ekuitas
Rp(1.027.872.430)*

E.10. Penurunan Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(1.027.872.430) dan Rp(996.497.075) mengalami kenaikan sebesar Rp(31.375.355) atau 3,15%.

*Ekuitas Akhir
Rp145.595.173.320*

E.11. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp145.595.173.320 dan Rp146.623.045.750 mengalami penurunan sebesar Rp(1.027.872.430) atau (0,7%).